

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apriyanto Nusa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang
- Ardhiwisastra, Y B, 2000, *Penafsiran Konstruksi Hukum*, Alumi, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fahmiron, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemenuhan Perlindungan Hak Anak*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn West Publishing Co, United States of America.
- HMA Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Praktik Hukum*, UMM Press, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska

John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet 1, Alumni, Bandung

Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti anggota Ikapi, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi 1992, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, pemeriksanaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta.

Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legal Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 16/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 17 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 2701 K/Pid.Sus/2018 tanggal 12 Maret 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 1944 K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018.



### C. Sumber Lain

Arfan Faiz Muhlizi, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang berkeadilan dan Berkepastian Hukum Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Extraordinary Reques To Judicial Review In Criminal Cases Aimed To Justice And Legal Certainty, *Jurnal Yudisial*, Vol 8 No 2, Agustus tahun 2015. <https://jurnal.komisiyudial.go.id/index.php/jy/article/view/50/0> diakses pada tanggal 12 Januari 2021

Agus Sahbani, diaploud pada kamis 12 Mei 2016, Akhirnya MK Larang Jaksa Ajukan PK, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk,> di akses pada tanggal 30 Januari 2021

Nahak, S, Hukum Mati Dalam Perspektif Wewenang Mahkamah Konstitusi (Death Punishment in perspective of authority of the constitutional court), *Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia* Volume 1 No 1 November 2012

Tri Jata Ayu Pramesti, kamis, 23 Januari 2014, *Kekuatan pembuktian Pengakuan Terdakwa di Persidangan* <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e015b3902e6/kekuat-sn-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan/#:~:text=kebenaran%20>, diakses 23 Januari 2021.